

**PENGARUH KOMPONEN ASET DAN
KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
TERHADAP BEBAN PAJAK KINI MASA
DEPAN**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2005-2011)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RENY KARTIKA SARI

12030111140251

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Reny Kartika Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140251

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KOMPONEN ASET DAN
KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
TERHADAP BEBAN PAJAK KINI MASA
DEPAN**

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.

Semarang, 25 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.)

NIP. 195805251991032001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Reny Kartika Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140251

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KOMPONEN ASET DAN
KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
TERHADAP BEBAN PAJAK KINI MASA
DEPAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 8 April 2015

Tim Penguji

1. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Nur Cahyonowati, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Reny Kartika Sari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Komponen Aset dan Kewajiban Pajak Tanggahan terhadap Beban Pajak Kini Masa Depan**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

Reny Kartika Sari

NIM : 12030111140251

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Al Insiroh: 6-8)

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil”

(Man jadda Wajada)

Sometimes life is risking everything for a dream, no one can see but you

(Author Unknown)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tersayang

Sahabat-sahabat terbaikku

*Terima kasih untuk semua doa, dukungan,
dan bantuannya*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the components of deferred tax assets and liabilities for future current tax over a three-year period ($t+1$, $t+2$, $t+3$). Deferred tax assets and liabilities arising from timing differences in the recognition of revenues and expenses based on financial accounting standards and tax laws. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are recognized in the financial statements because it can lead to future tax payments to be larger or smaller.

Sample of this study consists of 88 companies from manufacturing sectors listed on Indonesia Stock Exchange in 2005-2011. Multiple regression analysis is used to determine the effect of each component of deferred tax assets and liabilities for future current tax. Data components of deferred tax assets and liabilities are taken from the Notes to the Financial Statements of the company.

The results show that deferred tax assets of post-employment benefits has negatively significant and deferred tax liabilities of accelerated depreciation has positively significant to future current tax. While the results for the deferred tax assets of accrued expenses do not affect future current tax. Future taxes paid related to the time reversal of deferred tax assets and liabilities. Accrued expenses may not be realized over a three-year period, so the deferred tax assets do not reverse.

Keywords: income tax, current tax, deferred tax assets and liabilities, PSAK 46.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak kini masa depan selama periode 3 tahun ke depan ($t+1$, $t+2$, $t+3$). Aset dan kewajiban pajak tangguhan timbul karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus diakui dalam laporan keuangan karena dapat menyebabkan pembayaran pajak masa depan menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Sampel penelitian terdiri atas 88 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2011. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak kini masa depan. Data komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan diambil dari Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja berpengaruh negatif signifikan dan kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat berpengaruh positif signifikan terhadap beban pajak kini masa depan. Sedangkan hasil untuk aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar tidak berpengaruh terhadap beban pajak kini masa depan. Beban pajak yang dibayar masa depan berkaitan dengan waktu pembalikan aset dan kewajiban pajak tangguhan. Biaya yang masih harus dibayar kemungkinan tidak terealisasi selama periode 3 tahun, sehingga aset pajak tangguhan tidak membalik.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, beban pajak kini, aset dan kewajiban pajak tangguhan, PSAK 46.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH KOMPONEN ASET DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP BEBAN PAJAK KINI MASA DEPAN”** (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2005-2011). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, SE, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan, serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Sugeng Pamudji, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan arahan selama proses perwalian.
4. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nurhadi dan Ibu Sulastri yang selalu mendoakan penulis, memberikan nasihat, semangat, dukungan baik moril maupun materiil, serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
7. Mbak Dini, Mas Singgih, dan Jasmine yang telah menjadi keluarga terdekat dan sebagai “rumah” kedua selama penulis di Semarang.

8. *Kosmate* Rita, Vita, Dewi, Risha, Mbak Nyak yang telah menjadi sahabat terdekat, bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan semangat, dukungan, doa, dan keceriaan. Terima kasih atas kebersamaan selama 3 tahun terakhir.
9. Sahabat-sahabat *next trip* Anis, Karin, Debra, Fia, Mas Arga, Nizar, Sule, Aris, Bayu. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan liburan yang sangat menyenangkan disaat penulis jenuh mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman *Comels gank* Umi, Nia, Nindy, Tsara, Rensi, Tanti, Kirana, Arin, Nidza, Lala. Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan keceriaan selama di Semarang.
11. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi Niko, Reza, Bang Jol, Danu, Huda, Nutfi, Aulia, Adit, Bahar. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan *sharing* selama bimbingan skripsi.
12. Tim KKN Banyuputih Rangers Rahma, Risma, Prima, Mbak Vira, Putri, Reza, Fahmi, Mas Yoi, Mas Oko. Terima kasih atas semangat, *sharing*, keceriaan, dan kebersamaan selama 1 bulan KKN.
13. Keluarga besar Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro angkatan 2011. Terima kasih atas pengalaman dan kebersamaan selama kuliah.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan dukungan, serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi karya yang lebih baik di masa depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	14
2.1.1 Teori Kegunaan Keputusan	14
2.1.2 Beban Pajak Kini	16
2.1.3 Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan	18
2.1.4 Komponen Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan	22

2.1.4.1	Aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja	24
2.1.4.2	Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar	27
2.1.4.2.1	Penyisihan piutang tidak tertagih	27
2.1.4.2.2	Penyisihan persediaan	29
2.1.4.3	Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat	29
2.1.5	Penelitian Terdahulu	30
2.2	Kerangka Pemikiran	36
2.3	Hipotesis	38
2.3.1	Pengaruh beban pajak kini tahun berjalan terhadap beban pajak kini masa depan	38
2.3.2	Pengaruh aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja terhadap beban pajak kini masa depan	39
2.3.3	Pengaruh aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar terhadap beban pajak kini masa depan	40
2.3.4	Pengaruh kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat terhadap beban pajak kini masa depan	41
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	43
3.1.1	Variabel Dependen	43
3.1.2	Variabel Independen	44
3.1.2.1	Beban pajak kini tahun berjalan	44
3.1.2.2	Aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja ...	45
3.1.2.3	Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar	45
3.1.2.4	Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat	46

3.2 Populasi dan Sampel	46
3.3 Jenis dan Sumber Data	47
3.4 Metode Pengumpulan Data	48
3.5 Metode Analisis	48
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	48
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	48
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	49
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas	49
3.5.2.3 Uji Heterokesdastisitas	50
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	51
3.5.3 Analisis Regresi	52
3.5.4 Pengujian Hipotesis	54
3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)	54
3.5.4.2 Uji Statistik F	54
3.5.4.3 Uji Statistik t	55
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	56
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	56
4.2 Analisis Data	58
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	58
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	61
4.2.2.1 Uji Normalitas	61
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas	64
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	66
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	69
4.2.3 Analisis Regresi	72

4.2.4 Koefisien Determinasi (R^2)	76
4.2.5 Uji Statistik F	79
4.2.6 Uji Statistik t	82
4.3 Interpretasi Hasil	86
4.3.1 Beban pajak kini tahun berjalan berpengaruh positif terhadap beban pajak kini masa depan	86
4.3.2 Aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja berpengaruh negatif terhadap beban pajak kini masa depan	87
4.3.3 Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar tidak berpengaruh terhadap beban pajak kini masa depan	89
4.3.4 Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat berpengaruh positif terhadap beban pajak kini masa depan	91
BAB V PENUTUP	93
5.1 Simpulan	93
5.2 Keterbatasan	95
5.3 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komponen Perbedaan Temporer	24
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1 Pengambilan Sampel	57
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	58
Tabel 4.3 Uji Kolmogorov-Smirnov Persamaan 1	61
Tabel 4.4 Uji Kolmogorov-Smirnov Persamaan 2	62
Tabel 4.5 Uji Kolmogorov-Smirnov Persamaan 3	63
Tabel 4.6 Uji Multikolonieritas Persamaan 1	64
Tabel 4.7 Uji Multikolonieritas Persamaan 2	64
Tabel 4.8 Uji Multikolonieritas Persamaan 3	65
Tabel 4.9 Uji Park Persamaan 1	66
Tabel 4.10 Uji Park Persamaan 2	67
Tabel 4.11 Uji Park Persamaan 3	68
Tabel 4.12 Uji Runs Test Persamaan 1	69
Tabel 4.13 Uji Runs Test Persamaan 2	70
Tabel 4.14 Uji Runs Test Persamaan 3	71
Tabel 4.15 Koefisien Parameter Persamaan 1	72
Tabel 4.16 Koefisien Parameter Persamaan 2	73
Tabel 4.17 Koefisien Parameter Persamaan 3	74
Tabel 4.18 Koefisien Determinasi (R^2) Persamaan 1	76
Tabel 4.19 Koefisien Determinasi (R^2) Persamaan 2	77

Tabel 4.20 Koefisien Determinasi (R^2) Persamaan 3	77
Tabel 4.21 Uji F Persamaan 1	78
Tabel 4.22 Uji F Persamaan 2	79
Tabel 4.23 Uji F Persamaan 3	80
Tabel 4.24 Uji Statistik t Persamaan 1	81
Tabel 4.25 Uji Statistik t Persamaan 2	83
Tabel 4.26 Uji Statistik t Persamaan 3	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN	99
LAMPIRAN B STATISTIK DESKRIPTIF	100
LAMPIRAN C UJI NORMALITAS	101
LAMPIRAN D UJI MULTIKOLONIERITAS	106
LAMPIRAN E UJI HETEROKESDASTISITAS	108
LAMPIRAN F UJI AUTOKORELASI.....	110
LAMPIRAN G ANALISIS REGRESI	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, kebutuhan akan informasi keuangan semakin meningkat. Para pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditur menggunakan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun perusahaan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para penggunanya. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha dari suatu entitas yang tersaji dalam laporan keuangan akan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan, baik bagi pengguna internal perusahaan maupun pengguna eksternal yang berkepentingan.

Pada umumnya terdapat dua jenis laporan keuangan yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Menurut Resmi (2011), laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial entitas, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditujukan untuk menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan. Basis penghitungan penghasilan sebelum pajak komersial berbeda dengan basis penghitungan penghasilan kena pajak berdasarkan fiskal, sehingga

terdapat perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya dari kedua basis tersebut. Pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak disebut sebagai Pajak Penghasilan Terutang atau *Income Tax Payable* yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pemerintah. Sedangkan pajak yang dihitung berdasar Penghasilan Sebelum Pajak disebut sebagai Beban Pajak Penghasilan atau *Income Tax Expense*. Wajib Pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum untuk kepentingan internal maupun kepentingan lainnya, namun untuk penghitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan yang diterapkan pemerintah yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan lainnya yang terkait (Nugroho, 2010).

Adanya perbedaan peraturan antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan bukan berarti perusahaan harus melakukan pembukuan ganda. Perusahaan cukup melakukan satu pembukuan saja yaitu pembukuan menurut akuntansi komersial. Namun, untuk menghitung Pajak Penghasilan yang akan disetorkan ke kas negara harus berdasarkan laba fiskal (penghasilan kena pajak) perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk memperoleh jumlah laba fiskal (penghasilan kena pajak) sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Terutang yang akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal terhadap laba komersial agar sesuai dengan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal adalah koreksi terhadap pendapatan dan biaya yang berbeda menurut akuntansi dan fiskal. Perbedaan pendapatan dan biaya tersebut dikelompokkan menjadi

perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan temporer (*temporary differences*) (Resmi, 2011).

Perbedaan permanen adalah perbedaan ketentuan antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan, sehingga tidak akan menimbulkan dampak pada periode-periode mendatang. Perbedaan temporer adalah perbedaan waktu pengakuan beban atau pendapatan dalam menghitung penghasilan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan perpajakan. Secara keseluruhan beban atau pendapatan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap periodenya. Perbedaan temporer dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Perbedaan temporer ini akan menimbulkan pajak tangguhan yang harus diakui dalam laporan keuangan sebagai aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan (Agoes dan Trisnawati, 2007).

Pajak tangguhan termasuk dalam pembahasan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan yang diatur dalam PSAK No. 46. Kompleksitas akuntansi untuk Pajak Penghasilan timbul karena aturan untuk menghitung laba kena pajak (untuk tujuan menghitung pajak terutang) berbeda dari aturan untuk menghitung laba komersial yang menjadi dasar laporan keuangan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk pemulihan nilai tercatat aset dan kewajiban, serta transaksi atau kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Pengakuan ini pada

akhirnya mengharuskan perusahaan untuk mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan (PSAK No. 46).

Penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa pajak tangguhan penting bagi banyak perusahaan. Poterba *et al.* (2011) menunjukkan bahwa sebanyak 35% dari perusahaan sampel mereka melaporkan posisi pajak tangguhan bersih lebih dari 5% dari total aset dan sebanyak 10% dari perusahaan sampel melaporkan posisi pajak tangguhan bersih lebih dari 10% dari total aset. Hal ini menunjukkan bahwa informasi tentang pajak tangguhan penting dan tidak dapat diabaikan para pengguna laporan keuangan. Sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan yang dinyatakan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan harus berguna bagi pengguna laporan keuangan karena dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi yang berguna adalah informasi yang mempunyai nilai relevan (*relevance*) dan rekewajiban (*reliability*). Relevan artinya informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Sedangkan rekewajiban artinya informasi akuntansi dianggap handal jika dapat diverifikasi, disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan dan bias. Informasi yang relevan memiliki nilai prediktif (*predictive value*), yaitu membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan (Kieso *et al.*, 2001).

Penilaian terhadap suatu perusahaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seringkali dilakukan dengan menganalisis informasi keuangan yang tersedia dalam laporan keuangan perusahaan. Salah satunya yaitu dengan menganalisis aset dan kewajiban pajak tangguhan perusahaan. Penelitian sebelumnya dalam akuntansi untuk pajak penghasilan memeriksa apakah pajak tangguhan yang diungkapkan dalam laporan keuangan memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur. Penelitian Bauman (2001), Phillips *et al.* (2003), Irreza dan Yulianti (2012) menggunakan beban pajak tangguhan untuk mendeteksi manajemen laba. Kemudian Lev dan Nissim (2004) dan Hanlon (2005) menunjukkan bahwa *book tax differences* dapat memberikan informasi tentang pertumbuhan laba dan persistensi laba. Selanjutnya Lynn *et al.* (2006) dan Acaranupong (2010) menggunakan informasi pajak tangguhan untuk memprediksi harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tangguhan menyediakan berbagai informasi penting.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan dapat merefleksikan nilai perusahaan karena menyebabkan beban pajak masa depan menjadi lebih besar atau lebih kecil (PSAK No. 46). Pernyataan ini didukung hasil penelitian Poterba *et al.* (2007) yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan sebagai manfaat pajak masa depan dan kewajiban pajak tangguhan sebagai pengorbanan pajak masa depan. Sejalan dengan penelitian Chang *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa penangguhan menunjukkan peningkatan dan penurunan aset dan kewajiban pada neraca, yang merefleksikan penghematan atau peningkatan pajak masa depan. Aset pajak tangguhan secara positif dan signifikan terkait dengan nilai perusahaan karena

menunjukkan penghematan pajak masa depan. Namun hasil untuk kewajiban pajak tangguhan secara umum kurang signifikan, mengindikasikan bahwa pasar melihat kewajiban pajak tangguhan hanya memiliki sedikit keterkaitan dengan pajak masa depan.

Dotan (2003) mengelompokkan perbedaan temporer menjadi dua, yaitu pendapatan atau biaya yang lebih dahulu diakui dalam penghasilan komersial daripada fiskal dan pendapatan atau biaya yang lebih dahulu diakui dalam penghasilan fiskal daripada komersial. Berdasarkan pengelompokan tersebut, Laux (2013) meneliti keterkaitan aset dan kewajiban pajak tangguhan dengan pajak yang dibayar masa depan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan asimetris antara aset dan kewajiban pajak tangguhan dan pajak yang dibayar masa depan. Komponen akrual pajak tangguhan yang diakui dalam penghasilan komersial sesuai dengan GAAP lebih dulu daripada fiskal dapat memberikan informasi tentang pajak yang dibayar masa depan. Sedangkan komponen yang diakui dalam penghasilan fiskal lebih dulu daripada komersial sesuai dengan GAAP tidak merefleksikan pajak yang dibayar masa depan.

Penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa beberapa komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan memberikan informasi tentang pajak yang dibayar masa depan dan beberapa komponen yang lain tidak. Hasil ini penting untuk dipahami karena informasi tentang pajak yang dibayar masa depan sangat berguna bagi investor untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan investasi. Keputusan investasi didasarkan pada aliran kas, sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi salah satu unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam

perhitungan aliran kas ketika membuat keputusan investasi. Jika suatu investasi diperkirakan akan menghemat biaya atau menambah pendapatan, maka di sisi lain akan menambah jumlah pajak penghasilan yang dibayar perusahaan. Oleh karena itu, ketika memperhitungkan aliran kas keluar dari investasi, perlu diperhitungkan pula jumlah pajak yang akan dibayarkan perusahaan (Ermayanti, 2011).

Penelitian tentang pengaruh komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak kini masa depan penting dilakukan untuk memberikan hasil empiris adanya keterkaitan diantara keduanya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak yang dibayar masa depan dan diproksi menggunakan beban pajak kini periode masa depan yang tercatat dalam laporan laba rugi. Beban pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Beban pajak kini menunjukkan jumlah pajak yang akan dibayarkan perusahaan pada tahun tersebut. Variabel independen diproksi menggunakan beban pajak kini (*current tax*) pada tahun berjalan dan komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang terdiri atas imbalan pasca kerja (*post employment benefits*), biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*), dan depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*). Tujuan menggunakan setiap komponen tersebut adalah untuk memperjelas pengaruh dari tiap-tiap komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap pajak yang dibayar masa depan. Amir *et al.* (1997) menyatakan bahwa pemisahan pajak tangguhan menjadi komponen-komponennya akan memberikan nilai relevan informasi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Laux (2013), yang dilakukan di Amerika Serikat terhadap perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di S&P 500. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan informasi aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk memprediksi pajak yang dibayar masa depan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menghilangkan beberapa komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang digunakan dalam penelitian Laux (2013). Komponen yang dihilangkan antara lain pendapatan yang masih harus diterima (*accrued revenues*), pendapatan diterima di muka (*unearned revenues*), dan aset dan kewajiban pajak tangguhan lainnya (*other deferred tax assets and liabilities*). Komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan ini dihilangkan karena sebagian besar laporan keuangan perusahaan tidak menyediakan informasi tersebut. Selain itu, penelitian ini tidak menguji keterkaitan pajak tangguhan terhadap harga pasar ekuitas, dan berfokus pada pengujian keterkaitan aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak kini masa depan saja.

Objek penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan di S&P 500 dari berbagai industri, sedangkan obyek penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur dijadikan sebagai obyek penelitian karena sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan manufaktur, sehingga data yang tersedia akan lebih banyak dan lebih mudah didapatkan. Selain itu

perusahaan manufaktur juga menyajikan aset dan kewajiban pajak tangguhan, sedangkan perusahaan dalam industri lainnya seperti perbankan dan asuransi belum tentu menyajikan aset dan kewajiban pajak tangguhan pada laporan keuangannya.

Mengingat kompleksitas akuntansi untuk pajak tangguhan, topik tentang pajak tangguhan cukup menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian akan memberikan bukti keterkaitan antara aset dan kewajiban pajak tangguhan dan pajak yang dibayar masa depan, yang dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti keterkaitan aset dan kewajiban pajak tangguhan dan beban pajak kini masa depan. Penelitian ini akan diberi judul “Pengaruh Komponen Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan terhadap Beban Pajak Kini Masa Depan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan dalam menentukan penghasilan. Perbedaan pengakuan atas pendapatan dan biaya antara laporan komersial dan laporan fiskal disebabkan oleh perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen disebabkan oleh perbedaan standar akuntansi dan peraturan perpajakan, sehingga tidak memiliki dampak di masa depan. Sedangkan perbedaan temporer merupakan perbedaan waktu pengakuan atas pendapatan dan biaya berdasarkan standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang

memiliki dampak di masa depan. Perbedaan temporer inilah yang menyebabkan timbulnya aset dan kewajiban pajak tangguhan. Komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan diantaranya meliputi imbalan pasca kerja (*post employment benefits*), biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*), dan depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*). Aset dan kewajiban pajak tangguhan akan membalik di masa depan, sehingga menyebabkan beban pajak periode masa depan menjadi lebih besar atau lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa aset dan kewajiban pajak tangguhan dapat memberikan informasi tentang pajak yang dibayar masa depan.

Pajak yang dibayar masa depan adalah sejumlah beban pajak kini pada periode masa depan. Beban pajak kini merupakan pajak penghasilan terutang yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak. Penghasilan kena pajak atau penghasilan fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap penghasilan komersial. Koreksi fiskal positif atau negatif terhadap pendapatan atau biaya akan menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil, yang akan berdampak pula pada jumlah pajak terutangnya.

Beban pajak kini pada tahun berjalan adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak pada tahun tersebut. Namun, karena beban pajak kini baru diketahui pada akhir tahun pajak, estimasi jumlah beban pajak yang dibayar setiap bulannya didasarkan pada beban pajak kini tahun sebelumnya. Oleh karena itu, beban pajak kini pada tahun berjalan dan perbedaan temporer yang menyebabkan aset dan kewajiban pajak tangguhan akan memberikan dampak pada beban pajak kini masa depan. Hal ini memunculkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh beban pajak kini tahun berjalan terhadap beban pajak kini masa depan?
2. Bagaimana pengaruh aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja terhadap beban pajak kini masa depan?
3. Bagaimana pengaruh aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar terhadap beban pajak kini masa depan?
4. Bagaimana pengaruh kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat terhadap beban pajak kini masa depan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh beban pajak kini tahun berjalan terhadap beban pajak kini masa depan.
2. Menguji pengaruh masing-masing komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang terdiri atas imbalan pasca kerja, biaya yang masih harus dibayar, dan depresiasi dipercepat terhadap beban pajak kini masa depan.
3. Menyajikan hasil uji empiris pengaruh beban pajak kini tahun berjalan dan komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak kini masa depan.
4. Memberikan bukti empiris pengaruh beban pajak kini tahun berjalan dan komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak kini masa depan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris adanya pengaruh beban pajak kini tahun berjalan dan komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak kini masa depan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemajuan pendidikan khususnya di bidang akuntansi perpajakan.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi tambahan bagi para pengguna laporan keuangan, khususnya investor untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pasar modal.
2. Memberikan informasi tentang beban pajak yang dibayar masa depan dengan data aset dan kewajiban pajak tangguhan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dibuat untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai struktur penulisan yang terdiri atas lima bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori yang menjadi landasan dalam penelitian, konsep yang terkait dengan variabel penelitian, beberapa penelitian dengan tema serupa yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian yang digunakan, definisi operasional dari masing-masing variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, serta metode analisis dalam melakukan penelitian.

BAB 4 HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan gambaran mengenai deskripsi objek penelitian, pembahasan hasil analisis, dan interpretasi hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi dan berisi kesimpulan hasil analisis, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Kegunaan Keputusan (*Decision-Usefulness Theory*)

Teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) pertama kali digunakan oleh Chambers. Ia mengatakan bahwa:

Oleh karenanya, akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan... Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, sistem seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua muncul dari pemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan Belkoui (dikutip oleh Tenaya, 2007).

Menurut Staubus (dalam Kiswara, 2011), teori kegunaan keputusan mencakup syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Premis dari teori kegunaan-keputusan adalah:

1. Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi finansial mengenai perusahaan guna pengambilan keputusan;
2. Tujuan akuntansi dikaitkan dengan investor adalah menyediakan informasi finansial mengenai suatu perusahaan yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan investasi;
3. Investor mencakup pengertian pemilik dan kreditur.

Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Komponen-komponen tersebut berupa karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang perlu dipertimbangkan oleh penyaji informasi akuntansi agar menghasilkan informasi yang berkualitas dan berguna bagi para pengambil keputusan (Kiswara, 2011).

Karakteristik kualitatif membentuk suatu hierarki kualitas informasi akuntansi yang dibedakan menjadi dua, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer terdiri atas relevansi (*relevance*) dan rekejawaban (*reliability*) yang akan membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Relevansi adalah informasi akuntansi yang akan membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Sedangkan rekejawaban adalah informasi akuntansi akan dianggap handal jika dapat diverifikasi, disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan dan bias (Kieso *et al.*, 2002).

Berkaitan dengan relevansi informasi akuntansi, informasi yang relevan harus memiliki nilai prediktif (*predictive value*), yang akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya, informasi yang tersedia dalam laporan keuangan harus mempunyai nilai prediktif, yang akan digunakan untuk memprediksi hasil tertentu di masa depan. Hal ini akan membuat informasi relevan bagi investor, kreditur, dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan investasi atau keputusan sejenis (Kieso *et al.*, 2002).

2.1.2 Beban Pajak Kini

Akuntansi untuk Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam PSAK No. 46. Tujuan dari PSAK No. 46 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan. Penghasilan sebagai objek pajak didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Atas penghasilan tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan (PSAK No. 46).

PSAK No. 46 menjelaskan tentang pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*), yang jumlah agregatnya dicatat sebagai beban pajak (*tax expense*) dalam penghitungan laba rugi satu periode. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya, diakui sebagai aset.

Beban pajak kini merupakan jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, selanjutnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal sebagai dasar penghitungan pajak terutang diperoleh dari

hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak (laba akuntansi). Koreksi dilakukan terhadap pendapatan dan biaya yang berbeda pengakuannya antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal (Wicaksono, 2011).

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Beban pajak kini yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan akan diketahui pada akhir tahun setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan komersial. Oleh karena itu besarnya angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan wajib pajak setiap bulan adalah sebesar pajak terutang tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Penghasilan tahun berjalan diasumsikan sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun. Selisih pajak yang telah dibayarkan

dengan pajak sesungguhnya yang harus dibayar wajib pajak akan diakui sebagai pajak kurang bayar atau lebih bayar. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak kini periode berjalan akan berkaitan dengan beban pajak kini periode selanjutnya.

2.1.3 Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan

Laporan keuangan komersial didasarkan pada standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan fiskal didasarkan pada peraturan perpajakan. Perbedaan jumlah kena pajak karena perbedaan waktu pengakuan antara pendapatan dan biaya yang diakui dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menimbulkan suatu jumlah yang disebut sebagai pajak tangguhan. Berdasarkan pendekatan neraca (*balance sheet approach*) pajak tangguhan harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Pendekatan ini menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang (Merina, 2012).

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan

membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang (PSAK No. 46).

Pengakuan aset atau kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat, berarti bahwa perusahaan pelapor akan dapat memulihkan nilai tercatat aset tersebut atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aset atau pelunasan kewajiban akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian (PSAK No. 46).

Subramanyam dan Wild (2011) dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan menyatakan bahwa kewajiban (aset) pajak tangguhan menunjukkan pembayaran pajak aktual akan secara proporsional lebih tinggi (atau lebih rendah) di masa depan karena pembayaran pajak secara proporsional lebih rendah (atau lebih tinggi) di masa lalu. Umumnya, kewajiban atau aset pajak tangguhan menunjukkan:

1. Kewajiban pajak tangguhan: laba komersial lebih tinggi daripada laba kena pajak di masa lalu; pembayaran pajak di masa lalu relatif (dilihat sebagai persentase dari laba komersial) lebih rendah sehingga pembayaran pajak di masa depan diperkirakan akan relatif (dilihat dari persentase dari laba komersial) lebih tinggi.

2. Aset pajak tangguhan: laba komersial lebih rendah daripada laba kena pajak di masa lalu; pembayaran pajak di masa lalu relatif (dilihat sebagai persentase dari laba komersial) lebih tinggi sehingga pembayaran pajak di masa depan diperkirakan akan relatif (dilihat dari persentase dari laba komersial) lebih rendah.

Berdasarkan PSAK No. 46 kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

- a. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
- b. sisa kompensasi kerugian.

Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa:

- a. perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*); atau
- b. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah

yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*) (PSAK No. 46).

SFAS No. 109 paragraf 11 mengungkapkan bahwa asumsi yang melekat pada laporan posisi keuangan perusahaan sesuai dengan GAAP adalah jumlah yang dilaporkan dari aset dan kewajiban yang akan dipulihkan dan dilunasi. Berdasarkan asumsi tersebut, perbedaan diantara basis pajak dari aset atau kewajiban dan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan akan menghasilkan jumlah kena pajak (*taxable*) atau jumlah yang dapat dikurangkan (*deductible*) di tahun-tahun mendatang ketika jumlah yang dilaporkan dari aset dipulihkan dan jumlah yang dilaporkan dari kewajiban dilunasi. Contoh:

- a. Pendapatan atau keuntungan yang kena pajak (*taxable*) setelah diakui lebih dulu dalam penghasilan komersial. Suatu aset (misal, piutang dari penjualan angsuran) diakui sebagai pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak (*taxable*) ketika aset dipulihkan.
- b. Biaya atau kerugian yang boleh dikurangkan (*deductible*) setelah diakui lebih dulu dalam penghasilan komersial. Suatu kewajiban (misal, kewajiban garansi) diakui sebagai biaya atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan (*deductible*) ketika kewajiban dibayarkan.
- c. Pendapatan atau keuntungan yang kena pajak (*taxable*) sebelum diakui dalam penghasilan komersial. Suatu kewajiban (misal, *subscription*

diterima di muka) diakui sebagai pembayaran diterima di muka untuk barang dan jasa yang akan disediakan di tahun mendatang. Untuk tujuan pajak, pembayaran diterima di muka termasuk dalam penghasilan kena pajak (*taxable income*) pada saat kas diterima. Pengorbanan masa depan untuk menyediakan barang dan jasa akan menghasilkan jumlah pajak yang dapat dikurangkan (*tax deductible amounts*) di masa depan ketika kewajiban dibayarkan.

- d. Biaya atau kerugian yang dapat dikurangkan (*deductible*) sebelum diakui dalam penghasilan komersial. Biaya dari aset (misal, depresiasi dipercepat) telah dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada didepresiasi untuk pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima pada saat pemulihan masa depan dari jumlah aset untuk pelaporan keuangan akan melebihi sisa dasar pajak dari aset, dan kelebihan akan dikenakan pajak (*taxable*) ketika aset dipulihkan (SFAS No. 109).

2.1.4 Komponen Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan

Berdasarkan PSAK No. 46 dan SFAS No. 109 aset dan kewajiban pajak tangguhan dibentuk dari beberapa komponen akrual yang disebabkan oleh perbedaan temporer. Waluyo (2012) menyatakan bahwa perbedaan temporer dimaksudkan sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau kewajiban dengan nilai tercatat pada aset atau kewajiban yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah (*future taxable amount*) atau berkurang (*future*

deductible amount) pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi/ dibayar. Perbedaan temporer ini berakibat harus diakui aset dan/ atau kewajiban pajak tangguhan. Hal ini dapat terjadi pada kondisi:

1. Pendapatan atau beban yang harus diakui untuk menghitung laba fiskal atau laba komersial dalam periode yang berbeda.
2. *Goodwill* atau *goodwill* negatif yang terjadi saat konsolidasi.
3. Perbedaan nilai tercatat dengan *tax base* dari suatu aset atau kewajiban pada saat pengakuan awal.
4. Bagian dari biaya perolehan saat penggabungan usaha yang bermakna akuisisi dialokasikan ke aset atau kewajiban tertentu atas dasar nilai wajar, perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak (Waluyo, 2012).

Subramanyam dan Wild (2011) memberikan contoh komponen perbedaan temporer yang menimbulkan aset dan kewajiban pajak tangguhan karena perbedaan waktu pengakuan antara laba komersial dan laba fiskal seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Komponen Perbedaan Temporer yang Menimbulkan Aset dan Kewajiban Pajak Tanggihan

Diakui Komersial Lebih Dulu daripada Pajak	Diakui Pajak Lebih Dulu daripada Komersial
Pendapatan: 1. Penjualan cicilan – metode akrual 2. Metode ekuitas dari akuntansi investasi	Pendapatan: 1. Penerimaan penghasilan pencatatan di muka 2. Pendapatan sewa diterima di muka 3. Kontrak jasa dibayar di muka 4. Royalti yang diterima di muka
Pengeluaran: 1. Beban/ kewajiban garansi produk 2. Tunjangan pensiun 3. Penyisihan piutang tidak tertagih 4. Penurunan nilai aset – persediaan, properti, pabrik, dan peralatan 5. Beban restrukturisasi 6. Beban sewa modal 7. Rugi pajak dibawa ke depan	Pengeluaran: 1. Penyusutan yang dipercepat untuk pajak 2. Kapitalisasi biaya tertentu

Sumber: Subramanyam dan Wild (2011)

2.1.4.1 Aset pajak tanggihan dari imbalan pasca kerja (*post employment benefits*)

Berdasarkan PSAK No. 24, imbalan pasca kerja adalah imbalan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan ketika karyawan sudah berhenti bekerja. Imbalan pasca kerja diantaranya terdiri atas:

- a. imbalan pasca kerja karena karyawan pensiun;
- b. imbalan pasca kerja karena karyawan sakit berkepanjangan/ cacat;
- c. imbalan pasca kerja karena karyawan meninggal dunia;

- d. imbalan pasca kerja karena karyawan mengundurkan diri (secara baik-baik).

Imbalan-imbalan pasca kerja secara akuntansi harus dicadangkan dari saat ini, karena imbalan-imbalan pasca kerja tersebut termasuk ke dalam salah satu konsep akuntansi yaitu *accrual basis* (PSAK No 24). Imbalan pasca kerja dapat dikurangkan dalam penghasilan komersial pada saat dibentuk cadangan, namun belum dapat dikurangkan dalam penghasilan fiskal sampai biaya tersebut benar-benar dibayarkan kepada karyawan di masa depan.

Imbalan pasca kerja juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terkait dengan biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expenses*). Pernyataan tersebut berbunyi:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;

5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan; dan
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam PSAK No. 46 dinyatakan bahwa imbalan pasca kerja termasuk dalam perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan menimbulkan aset pajak tangguhan. Salah satu bentuk imbalan pasca kerja yang termasuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah biaya manfaat pensiun (*retirement benefit cost*). Biaya tersebut dapat dikurangkan dalam penghitungan laba akuntansi, tetapi biaya tersebut baru dapat dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun tersebut dibayar oleh perusahaan. Perbedaan temporer adalah sebesar selisih antara nilai tercatat kewajiban dengan DPP-nya (DPP-nya umumnya adalah nol). Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan menimbulkan aset pajak tangguhan karena manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun dibayar (PSAK No. 46).

2.1.4.2 Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*)

Berdasarkan SFAS No. 109, biaya yang masih harus dibayar termasuk dalam kelompok biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) setelah diakui dalam penghasilan komersial. Misalnya, kewajiban garansi diakui sebagai biaya yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan pada saat kewajiban dilunasi. Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh pihak lain demi kepentingan perusahaan. Biaya tersebut sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya, namun belum dibayarkan oleh perusahaan, sehingga masih merupakan utang atau kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk melunasinya. Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya-biaya yang telah dicadangkan dan diakui dalam laporan keuangan komersial, namun belum diakui dalam laporan keuangan fiskal sampai biaya tersebut benar-benar dibayarkan perusahaan. Biaya yang masih harus dibayar diantaranya termasuk biaya garansi, biaya restrukturisasi, dan biaya litigasi dan lingkungan. Biaya yang dicadangkan lainnya termasuk penyisihan untuk piutang tidak tertagih dan penyisihan persediaan atas penurunan nilai pasar dan keusangan.

2.1.4.2.1 Penyisihan piutang tidak tertagih

Dalam praktik akuntansi komersial, pembentukan penyisihan (cadangan) guna mengantisipasi kemungkinan kerugian dari piutang tidak tertagih merupakan hal yang lazim. Perusahaan dapat menghapuskan dan membebaskan piutang yang

diragukan tingkat kolektibilitasnya pada penyisihan (cadangan) piutang tidak tertagih. Namun, ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pembentukan cadangan penghapusan tersebut. Ketentuan perpajakan lebih melihat realitas dan memberlakukan metode penghapusan langsung (*direct write-off method*) (Agoes dan Trisnawati, 2007).

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan, telah mengatur pembebanan sebagai biaya atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau lebih dikenal dengan penghapusan piutang dengan syarat:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.4.2.2 Penyisihan persediaan atas penurunan nilai pasar dan keusangan

Dalam akuntansi komersial, apabila terjadi penurunan nilai pasar, seluruh kerugian persediaan tersebut diakui sebagai beban/ biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Namun dalam akuntansi pajak kerugian tersebut tidak dapat diakui karena pajak melihat fakta riil (nyata-nyata) dan tidak menerima antisipasi kerugian. Pajak akan mengakui sebagai kerugian apabila barang yang dijual tersebut yang memang benar-benar mengalami kerugian. Demikian halnya penghapusan nilai persediaan tidak diperkenankan, kecuali apabila nilai persediaan tersebut nyata-nyata secara fisik tidak dapat dijual atau digunakan dalam kegiatan perusahaan (*defect*) yang biasa dikategorikan rusak, cacat, atau usang (Waluyo, 2012).

2.1.4.3 Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*)

Berdasarkan SFAS No. 109, depresiasi dipercepat termasuk dalam kelompok biaya yang telah dikurangkan (*deductible expenses*) sebelum diakui dalam penghasilan komersial. Biaya depresiasi untuk tujuan pajak telah dikurangkan lebih cepat daripada didepresiasi untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada saat pemulihan di masa depan, jumlah nilai sisa dari aset untuk tujuan pelaporan keuangan akan melebihi jumlah nilai sisa aset untuk tujuan pajak, dan kelebihan tersebut akan dikenakan pajak saat aset dipulihkan.

Dalam PSAK No. 46 dijelaskan bahwa perbedaan temporer timbul apabila penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi yang berbeda

dengan periode saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam penghitungan laba fiskal. Contoh perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, misalnya: penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba fiskal mungkin berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba akuntansi. Perbedaan temporernya adalah selisih antara nilai tercatat aktiva tetap dengan DPP-nya. DPP aktiva tetap adalah sebesar harga perolehan dikurangi seluruh pengurangan yang diperkenankan oleh peraturan perundangan perpajakan dalam penghitungan fiskal. Perbedaan temporer kena pajak tersebut menyebabkan timbulnya kewajiban pajak tangguhan, apabila penyusutan menurut pajak menggunakan metode dipercepat (*accelerated*) (PSAK No. 46).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya, Laux (2013) mengategorikan komponen pajak tangguhan menjadi empat, yaitu (1) aset dan kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari pendapatan dan beban yang lebih dulu diakui dalam penghasilan komersial sesuai dengan GAAP daripada diakui dalam penghasilan fiskal, meliputi imbalan pasca kerja (*post employment benefits*), biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*) dan pendapatan yang masih harus diterima (*accrued revenues*); (2) aset dan kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari pendapatan dan beban yang diakui dalam penghasilan komersial sesuai dengan GAAP setelah diakui dalam penghasilan fiskal, meliputi depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*) dan pendapatan diterima di muka (*unearned revenues*); (3) aset

pajak tangguhan dari rugi fiskal yang dapat dikompensasikan (*tax losses carryforwards*); dan (4) aset dan kewajiban pajak tangguhan lainnya (*other deferred tax assets and liabilities*) (Laux, 2013).

Hubungan antara pajak tangguhan dan pajak yang dibayar masa depan tergantung pada kapan pajak tangguhan membalik. Amir *et al.* (1997) menginvestigasi nilai relevan dari komponen pajak tangguhan. Komponen ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan Fortune 500 antara tahun 1992-1994, yang diklasifikasikan menjadi tujuh kategori: pajak tangguhan dari depresiasi dan amortisasi, kerugian dan kredit yang dapat dikompensasikan, biaya restrukturisasi, biaya lingkungan, imbalan pasca kerja karyawan, penilaian cadangan, dan pajak tangguhan lainnya. Peneliti menemukan bahwa pemisahan pajak tangguhan ke dalam komponen-komponen menyediakan nilai relevan informasi. Penilaian koefisien pada kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dan amortisasi mendekati nol. Hasil ini merefleksikan harapan investor bahwa perusahaan akan terus menginvestasikan pada aset yang didepresiasi, yang mengurangi kemungkinan pembalikan masa depan. Peneliti juga menemukan bahwa pajak tangguhan dari biaya restrukturisasi mempunyai koefisien penilaian lebih besar daripada komponen pajak tangguhan lainnya. Secara keseluruhan, penilaian investor terhadap pajak tangguhan bergantung pada kapan pajak tangguhan membalik (Amir *et al.*, 1997).

Chang *et al.* (2009) memberikan penilaian yang berbeda terhadap aset dan kewajiban pajak tangguhan. Pasar menilai peningkatan kewajiban pajak tangguhan secara negatif dan peningkatan aset pajak tangguhan secara positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan pada neraca dinilai secara positif dan signifikan terkait dengan nilai perusahaan yang mengindikasikan bahwa pasar memahami item ini sebagai aset perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya dan ekspektasi peneliti bahwa aset pajak tangguhan dipahami sebagai penghematan pajak masa depan.

Pajak tangguhan menunjukkan peningkatan dan penurunan aset dan kewajiban di neraca yang merefleksikan penghematan atau pembayaran pajak masa depan. Secara keseluruhan, hasil penelitian memberikan bukti bahwa pasar menganggap aset pajak tangguhan sebagai penghematan pajak masa depan dan kewajiban pajak tangguhan sebagai beban pajak masa depan. Hasil untuk aset pajak tangguhan dari kompensasi rugi fiskal menunjukkan sifat hubungan yang tidak dapat ditentukan. Pada satu sisi secara positif menunjukkan penghematan pajak masa depan, namun di sisi lain secara negatif diinterpretasikan sebagai suatu tanda kerugian di masa depan (Chang *et al.*, 2009).

Penelitian Acaranupong (2010) menguji apakah investor juga menggunakan informasi tentang pajak tangguhan. Hasil pengujian memberikan bukti bahwa investor juga menggunakan aset dan kewajiban pajak tangguhan dalam menilai investasi mereka. Mereka menyimpulkan dari hasil analisis regresi bahwa aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan adalah nilai informasi yang relevan dan investor menilai aset pajak tangguhan sebagai manfaat pajak masa depan dan kewajiban pajak tangguhan sebagai pengorbanan pajak masa depan. Keduanya merefleksikan nilai perusahaan. Hasil investigasi nilai relevan aset dan kewajiban pajak tangguhan mengindikasikan bahwa aset dan

kewajiban pajak tangguhan secara signifikan terkait dengan harga saham. Hasil mereka menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara harga saham dan pajak tangguhan. Ini dapat disimpulkan bahwa aset dan kewajiban pajak tangguhan merupakan informasi yang berguna bagi investor.

Dotan (2003) berpendapat bahwa beberapa komponen pajak tangguhan memiliki nilai dan beberapa tidak. Istilah “memiliki nilai” berarti, dalam konteks penelitian ini, untuk mewakili riil aset dan kewajiban. Komponen pajak tangguhan yang memiliki nilai dapat merefleksikan pembayaran atau manfaat pajak masa depan. Misalnya, kewajiban pajak tangguhan timbul dari penjualan angsuran memiliki nilai, sementara kewajiban pajak tangguhan timbul dari depresiasi dipercepat tidak. Peneliti mengklasifikasikan perbedaan temporer menjadi dua tipe. Tipe 1, timbul dari transaksi dimana pengakuan komersial lebih dahulu daripada pengakuan fiskal, pendapatan dan beban ini termasuk dalam penghasilan sebelum pajak dan tipe 2 ketika pengakuan fiskal lebih dahulu daripada pengakuan komersial, pendapatan dan beban ini termasuk dalam penghasilan setelah pajak.

Laux (2013) mengembangkan variasi empiris Dotan (2003) untuk menguji apakah pajak tangguhan memberikan informasi tambahan tentang pajak yang dibayar masa depan, apa yang mempengaruhi hubungan keduanya, dan kapan rekening pajak tangguhan membalik. Analisis menunjukkan ada hubungan asimetris antara pajak tangguhan dan pajak yang dibayar masa depan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari pendapatan dan biaya yang lebih dahulu diakui dalam penghasilan komersial berdasarkan GAAP daripada

pengakuan dalam penghasilan fiskal memberikan informasi tentang pajak yang dibayar masa depan. Sebaliknya, aset dan kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari pendapatan dan biaya yang lebih dahulu diakui dalam penghasilan fiskal daripada diakui dalam penghasilan komersial berdasarkan GAAP tidak memberikan informasi tentang pajak yang dibayar masa depan.

Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Chang <i>et al.</i> (2009)	<i>Market's Perception of Deferred Tax Accruals</i>	Variabel Dependen: Nilai perusahaan Variabel Independen: Kewajiban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan.	Pajak tangguhan menunjukkan peningkatan dan penurunan aset dan kewajiban di neraca yang merefleksikan penghematan atau pembayaran pajak masa depan. Secara keseluruhan, hasil penelitian memberikan bukti bahwa pasar menilai aset pajak tangguhan secara positif sebagai penghematan pajak masa depan dan menilai kewajiban pajak tangguhan secara negatif sebagai beban pajak masa depan.
2.	Acaranupong (2010)	<i>Value Relevance and Components of Deferred Tax Assets and Liabilities: Evidence from the Listed Companies</i>	Variabel Dependen: Harga saham Variabel Independen: Aset dan kewajiban pajak tangguhan	Investor menggunakan aset dan kewajiban pajak tangguhan dalam menilai investasi mereka. Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan adalah nilai informasi yang relevan dan investor menilai aset pajak tangguhan sebagai manfaat pajak masa depan dan kewajiban pajak

		<i>on SET 100 in Thailand</i>		tanggungan sebagai pengorbanan pajak masa depan. Keduanya merefleksikan nilai perusahaan. Hasil investigasi nilai relevan aset dan kewajiban pajak tanggungan juga mengindikasikan bahwa aset dan kewajiban pajak tanggungan secara signifikan terkait dengan harga saham.
3.	Dotan (2003)	<i>On The Value of Deferred Taxes</i>	Variabel Dependen: - Variabel Independen: -	Pajak tanggungan dibedakan menjadi dua tipe. Tipe 1, timbul dari transaksi dimana pengakuan komersial lebih dahulu daripada pengakuan fiskal dan tipe 2, ketika pengakuan fiskal lebih dahulu daripada pengakuan komersial. Beberapa komponen pajak tanggungan memiliki nilai dan beberapa tidak, yang memiliki nilai adalah yang merefleksikan pembayaran atau manfaat pajak masa depan. Tipe 1 memiliki nilai sedangkan tipe 2 tidak.
4.	Laux (2013)	<i>The Association between Deferred Tax Assets and Liabilities and Future Tax Payments</i>	Variabel Dependen: Pembayaran pajak masa depan Variabel Independen: Aset dan kewajiban pajak tanggungan	Ada hubungan asimetris antara aset dan kewajiban pajak tanggungan dan pajak yang dibayar masa depan. Aset dan kewajiban pajak tanggungan yang timbul dari pendapatan dan biaya yang lebih dahulu diakui dalam penghasilan komersial berdasarkan GAAP daripada pengakuan dalam penghasilan fiskal memberikan informasi

				tentang pajak yang dibayar masa depan. Sebaliknya, aset dan kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari pendapatan dan biaya yang lebih dahulu diakui dalam penghasilan fiskal daripada pengakuan dalam penghasilan komersial berdasarkan GAAP tidak memberikan informasi tentang pajak yang dibayar masa depan.
--	--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beban pajak terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Jumlah beban pajak kini akan diketahui pada akhir tahun setelah berakhirnya masa pajak. Oleh karena itu angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar setiap bulan dihitung berdasarkan pajak terutang pada periode sebelumnya. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban dan apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya, diakui sebagai aset.

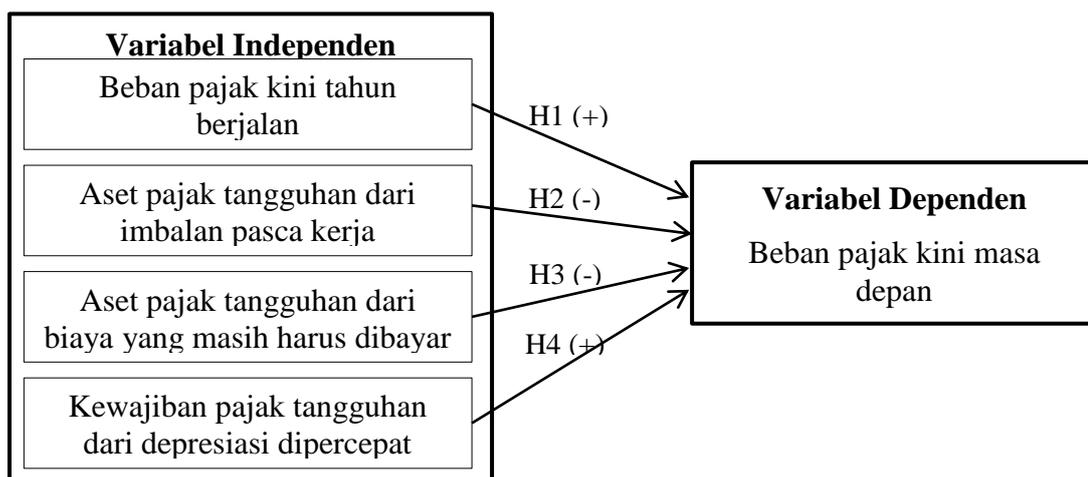
Pajak tangguhan terdiri atas aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan sisa kompensasi kerugian. Sedangkan kewajiban pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan

terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aset dan kewajiban pajak tangguhan ini timbul karena perbedaan perlakuan terhadap pendapatan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan. Komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan terdiri atas imbalan pasca kerja (*post employment benefits*), biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*), dan depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*).

Penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa komponen pajak tangguhan dapat memberikan informasi tentang pajak yang dibayar masa depan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan menyebabkan pembayaran pajak masa depan menjadi lebih besar atau lebih kecil akibat pemulihan nilai tercatat aset dan pelunasan kewajiban tersebut. Pajak yang dibayar di masa depan diproksi menggunakan beban pajak kini perusahaan di periode masa depan. Berdasarkan berbagai konsep yang telah disebutkan sebelumnya, maka akan tergambar kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh beban pajak kini tahun berjalan terhadap beban pajak kini masa depan

Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Beban pajak kini tahun berjalan dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak pada periode tersebut. Beban pajak kini tahun berjalan merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, namun jumlah ini baru diketahui pada akhir tahun setelah berakhirnya masa pajak. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan setiap bulan diestimasi berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya dikurangi kredit pajak kemudian dibagi 12. Angsuran Pajak Penghasilan setiap bulan dijadikan sebagai kredit pajak sampai berakhirnya tahun pajak. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak kini periode berjalan berkaitan dengan beban pajak kini periode selanjutnya. Selisih jumlah pajak yang telah dibayarkan dengan beban pajak kini sesungguhnya yang harus dibayar wajib pajak disebut sebagai pajak kurang bayar atau lebih bayar. Berdasarkan PSAK No. 46, jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya, diakui sebagai aset.

Penelitian Laux (2013) menggunakan beban pajak kini sebagai proksi untuk pajak yang dibayar perusahaan pada tahun berjalan. Laux (2013)

menyatakan bahwa beban pajak kini tahun berjalan diharapkan berhubungan positif dengan beban pajak kini masa depan pada semua spesifikasi. Dari penjelasan ini, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Beban pajak kini tahun berjalan berpengaruh positif terhadap beban pajak kini masa depan.

2.3.2 Pengaruh aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja terhadap beban pajak kini masa depan

Imbalan pasca kerja adalah imbalan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan ketika karyawan sudah berhenti bekerja. Dalam PSAK No. 46 dijelaskan bahwa imbalan pasca kerja termasuk dalam perbedaan temporer yang boleh dikurangkan yang menimbulkan aset pajak tangguhan. Termasuk dalam imbalan pasca kerja adalah biaya manfaat pension (*retirement benefit cost*), yaitu imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Biaya atas imbalan pasca kerja dapat dikurangkan dalam penghitungan laba akuntansi, tetapi baru dapat dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun tersebut dibayar oleh perusahaan. Akuntansi komersial mengakui biaya pada waktu pencadangan, sedangkan akuntansi fiskal mengakui biaya pada waktu terjadi pensiun. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan menimbulkan aset pajak tangguhan karena manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun dibayar (PSAK No. 46).

Laux (2013) mengkategorikan imbalan pasca kerja ke dalam aset pajak tangguhan yang timbul dari biaya yang telah diakui dalam penghasilan komersial

namun belum diakui dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak pada saat biaya dibayarkan kepada pekerja di masa depan. Oleh karena itu, biaya atas imbalan pasca kerja akan mengakibatkan beban pajak kini masa depan menjadi lebih rendah atau menghemat pembayaran pajak di masa depan. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja berpengaruh negatif terhadap beban pajak kini masa depan.

2.3.3 Pengaruh aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar terhadap beban pajak kini masa depan

Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya-biaya yang telah dicadangkan dan diakui dalam laporan keuangan komersial, namun belum diakui dalam laporan keuangan fiskal sampai biaya tersebut benar-benar dibayarkan. Sesuai dengan SFAS No. 109 paragraf 11, biaya yang masih harus dibayar termasuk dalam kelompok biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expenses*) setelah diakui dalam penghasilan keuangan. Misalnya suatu kewajiban garansi diakui sebagai biaya yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan (*deductible*) ketika kewajiban garansi dibayarkan.

Laux (2013) menjelaskan bahwa untuk tujuan pelaporan keuangan, pada saat perusahaan mengakui pendapatan penjualan, pada saat yang sama perusahaan juga mengestimasi biaya garansi masa depan. Sedangkan untuk tujuan pajak yang menggunakan basis kas, perusahaan tidak dapat memotong biaya garansi sampai kewajiban tersebut diselesaikan. Misalnya, perusahaan akan menerima manfaat

pajak sebesar \$200 ketika kewajiban garansi sebesar \$500 diselesaikan. Pada saat mengakui biaya garansi sebesar \$500 pada penghasilan keuangan, perusahaan akan mencatat aset pajak tangguhan sebesar \$200 pada neraca dan manfaat pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Aset pajak tangguhan akan membalik pada tahun perusahaan melakukan pembayaran tunai untuk menyelesaikan kewajiban garansi. Biaya garansi tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak masa depan, sehingga akan menghemat pembayaran pajak masa depan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar berpengaruh negatif terhadap beban pajak kini masa depan.

2.3.4 Pengaruh kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat terhadap beban pajak kini masa depan

Depresiasi dipercepat adalah biaya depresiasi yang telah dikurangkan lebih dahulu untuk tujuan pajak daripada didepresiasi untuk tujuan pelaporan keuangan. Biaya ini termasuk dalam perbedaan temporer yang menimbulkan kewajiban pajak tangguhan karena mengakibatkan penghasilan fiskal lebih rendah dari penghasilan komersial. Sesuai penjelasan dari PSAK No. 46, contoh perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, misalnya: penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba fiskal mungkin berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba akuntansi. Perbedaan temporeranya adalah selisih antara nilai tercatat aset tetap dengan DPP-nya. DPP aset tetap adalah sebesar harga perolehan dikurangi seluruh pengurangan yang diperkenankan oleh peraturan perundangan perpajakan dalam

penghitungan fiskal. Perbedaan temporer kena pajak tersebut menyebabkan timbulnya kewajiban pajak tangguhan, apabila penyusutan menurut pajak menggunakan metode dipercepat (*accelerated*) (PSAK No. 46).

Laux (2013) memberikan contoh pada penyusutan pajak dipercepat (*accelerated depreciation*), yaitu ketika suatu aset didepresiasi untuk tujuan pajak (*tax depreciation*) lebih cepat dari tujuan pelaporan keuangan (*book depreciation*). Misalnya, total pemotongan hutang pajak kini untuk penyusutan setiap aset \$4,800 ($\$12,000 \times 40$ persen), yang akan diwujudkan selama dua tahun pertama (\$2400 per tahun) untuk tujuan pajak, dan selama tiga tahun (\$1.600 per tahun) untuk tujuan komersial sesuai dengan GAAP. Berdasarkan ASC 740, perusahaan menangguhkan pengakuan \$800 manfaat pajak di masing-masing dua tahun pertama setelah aset tersebut ditempatkan dalam pelayanan dengan mengakui kewajiban pajak tangguhan pada neraca dan beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Pada tahun ketiga ketika kewajiban pajak tangguhan membalik, beban pajak komersial akan menjadi lebih besar, namun hal ini tidak berdampak pada arus kas (Laux, 2013). Hariani (2005) menyatakan bahwa kewajiban pajak tangguhan menunjukkan pengorbanan di masa depan. Laba kena pajak dan laba yang ditangguhkan di periode mendatang akan timbul dari kejadian yang telah terjadi. Pembayaran pajak pada saat jatuh tempo adalah pengorbanan di masa depan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat berpengaruh positif terhadap beban pajak kini masa depan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Beban pajak kini masa depan adalah beban pajak kini pada periode masa depan yang dilaporkan pada laporan laba rugi perusahaan. Beban pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Beban pajak kini merupakan jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, selanjutnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan akuntansi).

Variabel dependen diukur berdasarkan referensi dari penelitian Laux (2013), dengan membagi beban pajak kini dengan rata-rata total aset yang diformulasikan dengan rumus:

$$PKMD_{t+n} = \frac{PKMD_{t+n}}{\text{Rata - rata total aset}}$$

Dari persamaan tersebut, t menunjukkan tahun dan n menunjukkan range dari 1 sampai 3. Analisis empiris memeriksa informasi dalam aset dan kewajiban pajak tangguhan selama periode 3 tahun karena banyak komponen pajak tangguhan

memerlukan waktu beberapa tahun sebelum efek pajak mereka direalisasikan (Laux, 2013).

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen terdiri atas beban pajak kini (*current tax*) pada tahun berjalan dan komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang terdiri atas imbalan pasca kerja (*post employment benefits*), biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*), dan depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*). Variabel independen diukur berdasarkan referensi dari penelitian Laux (2013), dengan membagi seluruh variabel dengan rata-rata total aset pada tahun tersebut.

3.1.2.1 Beban pajak kini (*current tax*) tahun berjalan

Beban pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Pajak kini merupakan jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, selanjutnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Beban pajak kini periode berjalan dihitung dengan cara membagi beban pajak kini dengan rata-rata total aset yang diformulasikan dengan rumus:

$$PK_t = \frac{\text{Beban pajak kini}}{\text{Rata - rata total aset}}$$

3.1.2.2 Aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja (*post employment benefits*)

Imbalan pasca kerja (*post employment benefits*) adalah imbalan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan ketika karyawan sudah berhenti bekerja. Imbalan diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan pekerjanya. Imbalan pasca kerja termasuk dalam perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) yang menimbulkan aset pajak tangguhan. Dalam penghasilan komersial, imbalan pasca kerja diakui sebagai beban pada waktu pencadangan, sedangkan penghasilan fiskal mengakui beban tersebut pada saat dibayarkan kepada pekerja di masa depan. Aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja dihitung dengan cara membagi imbalan pasca kerja dengan rata-rata total aset yang diformulasikan dengan rumus:

$$APT_IPK_t = \frac{\text{Imbalan pasca kerja}}{\text{Rata - rata total aset}}$$

3.1.2.3 Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*)

Biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*) adalah biaya yang merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya namun belum dibayarkan perusahaan, sehingga masih merupakan kewajiban yang harus ditanggung perusahaan. Biaya ini termasuk dalam perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) yang menimbulkan aset pajak tangguhan. Biaya yang masih harus dibayar dicadangkan dan diakui dalam penghasilan komersial, namun dalam penghasilan fiskal dengan basis kas, biaya

dapat diakui pada saat biaya tersebut benar-benar dibayarkan perusahaan di masa depan. Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar dihitung dengan cara membagi biaya yang masih harus dibayar dengan rata-rata total aset yang diformulasikan dengan rumus:

$$APT_BiayaYMHD_t = \frac{Biaya\ yang\ masih\ harus\ dibayar}{Rata - rata\ total\ aset}$$

3.1.2.4 Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*)

Depresiasi (*depreciation*) adalah jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*) termasuk dalam perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) yang akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan. Depresiasi menggunakan metode dipercepat dimana depresiasi berdasarkan fiskal lebih cepat daripada depresiasi berdasarkan komersial. Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi dipercepat dihitung dengan cara membagi depresiasi dengan rata-rata total aset yang diformulasikan dengan rumus:

$$KPT_DEP_t = \frac{Depresiasi}{Rata - rata\ total\ aset}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah semua perusahaan manufaktur dalam berbagai industri yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian adalah 88 perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI dari tahun 2005-2011 yang dipilih dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu metode pemilihan populasi sesuai dengan kriteria sampel yang diperlukan dalam penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini dipilih dimana perusahaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menyajikan akun aset dan/ atau kewajiban pajak tangguhan di laporan keuangan pada tahun 2005-2008.
2. Menyajikan akun beban pajak kini di laporan keuangan pada tahun 2005-2011.
3. Menyajikan komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang terdiri atas imbalan pasca kerja, biaya yang masih harus dibayar, dan depresiasi dengan metode dipercepat.
4. Menggunakan satuan mata uang rupiah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber yang ada. Data telah tersedia dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2013). Dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2011. Sumber data tersebut berasal dari Laporan Keuangan perusahaan pada tahun 2005-2011, *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* tahun 2005-2013, *website* IDX yaitu *www.idx.co.id*, dan Pojok BEI Universitas Diponegoro.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder pada penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang relevan baik dari perpustakaan maupun pencarian melalui internet untuk memperoleh informasi-informasi serta data-data yang diperlukan.

3.5 Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis regresi menggunakan program SPSS.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan variabel-variabel dalam penelitian ini. Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum atau deskripsi data yang digunakan dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi (Ghozali, 2011).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui model regresi baik dan tidak bias. Uji asumsi klasik adalah persyaratan yang harus dipenuhi suatu model penelitian sebelum dilakukan analisis regresi untuk menguji hipotesis. Dalam uji asumsi klasik ini model analisis yang digunakan akan menghasilkan estimator yang tidak bias apabila memenuhi beberapa asumsi klasik sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan analisis statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

Jika nilai probabilitas signifikansi di atas $\alpha = 0,05$ maka H₀ diterima, yang berarti data residual berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Park.

Park mengemukakan metode bahwa *variance* (s^2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\sigma^2_i = \alpha X_i\beta$$

Persamaan ini dijadikan linear dalam bentuk persamaan logaritma sehingga menjadi:

$$\text{Ln } \sigma^2_i = \alpha + \beta \text{ LnXi} + v_i$$

Karena s^2_i umumnya tidak diketahui, maka dapat ditaksir dengan menggunakan residual U_t sebagai proksi, sehingga persamaan menjadi:

$$\text{Ln}U^2_i = \alpha + \beta \text{ LnXi} + v_i$$

Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak (Ghozali, 2011).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan Run Test. Run Test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan

korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

H₀ : residual (res_1) random (acak)

H_A : residual (res_1) tidak random

Jika nilai probabilitas signifikansi di atas $\alpha = 0,05$ maka H₀ diterima, yang berarti data residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual (Ghozali, 2011).

3.5.3 Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan sebagai metode analisis karena dapat mengukur tingkat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen beban pajak kini masa depan, serta sifat hubungan masing-masing variabel independen apakah positif atau negatif terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi *time series* karena data penelitian yang dikumpulkan berasal dari data perusahaan yang sama dalam beberapa periode waktu yang berurutan. Model *time series* digunakan untuk memprediksi nilai-nilai masa depan yang didasarkan pada nilai-nilai masa lampau suatu variabel. Dalam penelitian ini terdapat 3 model regresi, karena beban pajak kini masa depan yang dianalisis selama periode 3 tahun ke depan. Model regresi yang digunakan adalah:

Persamaan 1:

$$PKMD_{t+1} = \beta_0 + \beta_1 PK_t + \beta_2 APT_IPK_t + \beta_3 APT_BiayaYMHD_t + \beta_4 KPT_DEP_t + \varepsilon \quad (3.1)$$

Persamaan 2:

$$PKMD_{t+2} = \beta_0 + \beta_1 PK_t + \beta_2 APT_IPK_t + \beta_3 APT_BiayaYMHD_t + \beta_4 KPT_DEP_t + \varepsilon \quad (3.2)$$

Persamaan 3:

$$PKMD_{t+3} = \beta_0 + \beta_1 PK_t + \beta_2 APT_IPK_t + \beta_3 APT_BiayaYMHD_t + \beta_4 KPT_DEP_t + \varepsilon \quad (3.3)$$

Keterangan:

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

$PKMD_{t+n}$ = Beban pajak kini masa depan ($n = 1, 2, 3$)

PK_t = Beban pajak kini tahun t

APT_IPK_t = Aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja

$APT_BiayaYMHD_t$ = Aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar

KPT_DEP_t = Kewajiban pajak tangguhan dari depresiasi

t = Tahun

ε = Error

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan terhadap 3 model regresi yang digunakan dalam penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi dan pengaruh tiap-tiap variabel independen yang terdiri atas beban pajak kini tahun berjalan, imbalan pasca kerja, biaya yang masih harus dibayar, dan depresiasi terhadap variabel dependen beban pajak kini masa depan. Pengujian hipotesis yang akan dilakukan adalah uji nilai koefisien determinasi (R^2), uji

signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat (Ghozali, 2011). Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. < 0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah tepat.
2. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. > 0,05), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak tepat.

3. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka model penelitian sudah tepat.

Jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti secara bersama-sama variabel dependen mempunyai pengaruh terhadap variabel independen.

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.